



Brigjen Pol Budi Hartono Untung

DENGAN KEMAMPUANNYA, POLAIR HARUS BISA MELINDUNGI DAN MENGAYOMI MASYARAKAT

FIGUR jenderal lulusan Akpol angkatan 1984 ini memang kurang suka publikasi. Padahal jabatannya memungkinkan dijadikan konsumsi media massa. Sepanjang karirnya lebih banyak mengabdikan di jajaran Dit Polair dengan lima kali menjabat direktur, yaitu di Polda Metrojaya, Sumut dan sekarang Dir Polair Baharkam Polri.

Hampir lima belas tahun berkecimpung di perairan, tentu seluk beluk perairan pun dikuasainya, termasuk mengetahui apa kelebihan kekurangannya. Kelebihannya, Dan sejauh pengamatannya, inilah yang dia dapatkan: ide menjadikan ilmu polair sebagai pengetahuan dasar kepolisian, mulai dari tingkat bintangara sampai Akpol. Ia ingin ilmu polair dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. "Sehingga ke depannya Polri tidak pernah mengalami kekurangan polisi yang memiliki kemampuan polair," tukas pria kelahiran Cimahi, 15-06-1959 ini.

Kemampuan Polair, katanya, saat ini sangat dibutuhkan untuk mengimbangi beragam ancaman kejahatan yang kini menggepung kehidupan manusia, dengan modus operandinya yang selalu berubah-ubah. Gencarnya tindakan penegakan hukum di darat, mengakibatkan kejahatan pun bergeser ke perairan. Dengan meningkatnya kejahatan di perairan, maka kamtibmas, aktifitas di perairan pun meningkat sehingga menimbulkan musibah. "Disinilah kita perlu meningkatkan kemampuan SAR dan kemampuan penyidikannya," papar Budi Untung.

Melanjutkan penjelasannya, ada dua kemampuan fungsi Polair yaitu kemampuan Fungsi Kepolisian (investigation skill) dan kemampuan di bidang Kematraan Polair (special skill).

Kemampuan Fungsi Kepolisian (investigation skill) adalah kemampuan fungsi yang berlaku umum pada kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kemampuan fungsi kepolisian seperti penyelidikan sampai pada proses penyidikan, Polair akan menggunakan kapal sebagai alat utama untuk kegiatan patroli, pengawasan, pengejaran/ penangkapan kapal sasaran.

Kemudian kapal tersebut akan dilakukan pelayaran ad hoc, untuk pemeriksaan lanjutan ke pelabuhan terdekat di wilayah perairan dengan dilengkapi Gambar Situasi Pengejaran dan penangkapannya (GSPP).

Sedangkan kemampuan di Bidang Kematraan Polair (technical/ special skill) adalah kemampuan yang merupakan aplikasi dari berbagai teknik-teknik yang harus dimiliki terutama dalam mengawaki dan mengoperasikan kapal patroli polisi yang memenuhi regulasi yang berlaku di dunia pelayaran di tingkat



nasional dan internasional maupun berbagai hal berkaitan dengan kelautan.

Itulah sebagian kutipan wawancara Jagratara dengan sosok yang dalam pergaulan sehari-hari dikenal "gaul" dan luwes, namun cenderung "ngeyel" dan mendominasi pembicaraan bila terlibat diskusi dengan lawan bicaranya. Meski demikian dia tak akan segan-segan mengakui kealahannya bila argumentasinya terbukti salah. Berikut ini wawancara selengkapnya. [jt 02]



FOTO: EVAJAGRATARA

Sejumlah masalah klasik masih membelit Polair antara lain sumber daya manusia dan sarana yang terbatas yang tidak sebanding dengan cakupan wilayah tugas di Indonesia. Bagaimana penjelasan Bapak?

Sumber daya manusia dan sarana yang terbatas memang masih menjadi kendala internal Polisi Perairan Baharkam Polri untuk mengawal dan mengamankan wilayah perairan Indonesia yang begitu luas terbentang dari Sabang sampai Merauke dari para pelaku kejahatan (baik kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan yg berdampak kontijensi dan kejahatan yang merugikan kekayaan negara). Fenomena ini menjadi tidak sebanding dengan domain/tupok Polisi Perairan yang cakupan wilayah tugasnya sangat luas sedangkan Polisi Perairan masih membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan sarana alat/kapal yang mampu menjangkau wilayah perairan khususnya dalam rangka pengamanan pulau terluar Indonesia. Namun demikian fenomena ini tidak menyurutkan semangat dalam melaksanakan tugas pokok sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat khususnya masyarakat perairan, justru kondisi tersebut menjadi pelecut bagi jajaran Polisi Perairan sehingga termotivasi dan tertantang untuk selalu konsisten dalam melaksanakan penegakan hukum serta komit dalam memelihara keamanan ketertiban di wilayah perairan NKRI.

Demi tegaknya keamanan NKRI, mantan Kapolri BHD meminta kepada Polisi Perairan (Polair) ikut

membantu pengamanan batas wilayah dan pulau terluar. Pengertian "ikut membantu" berarti Polair hanya membantu. Lalu menjadi tugas pokok siapa?

Sebenarnya berdasarkan peraturan presiden RI nomor 12 tahun 2010 yang menjadi leading sector masalah perbatasan dan pulau terluar dalah BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan), sedangkan Polisi Perairan adalah sebagai Stakeholder yang memiliki sarana alat utama/kapal untuk membantu pengamanan pulau-pulau terluar, relevan dengan hal tersebut dalam QUICK WIN Polisi Perairan mencanumkan program sambang nusa dimana prioritas program tersebut adalah melakukan kegiatan sambang pulau-pulau terluar Indonesia dalam berpartisipasi secara aktif dan intens ikut membantu mengawasi dan mengamankan pulau-pulau terluar kita (khususnya yang berpenghuni).

Terkadang situasi di lapangan tak seindah di kertas, sejauh apa Polair berperan dalam pengamanan di perairan agar tidak bersinggungan dengan Hankamnas?

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya Polisi Perairan berpedoman pada koridop-ayung hukum yang ada sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai sejauh mana peran Polisi Perairan berperan dalam pengamanan di perairan agar tidak bersinggungan dengan Hankamnas, tentunya



kita harus profesional dan proporsional bahwa semua berjalan relevan dengan porsi dan proporsinya masing-masing, berdasarkan ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan secara kelembagaan TNI/POLRI dimana peran Kepolisian RI adalah sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri sedangkan TNI adalah sebagai pertahanan nasional. Kemudian relevansinya dengan domain/tugas pokoknya Polisi Perairan bahwa yurisdiksi Polisi Perairan adalah laut teritorial kita. Tentunya untuk mengantisipasi adanya ketersinggungan maupun benturan lintas sektoral kita selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait/kelembagaan yang berkompeten dalam penegakan hukum di wilayah perairan.

Bagaimana Masalah kelengkapan persenjataan operasional Polair?

Masalah persenjataan Polair masih menggunakan senjata organik Polri yang sebagian adalah produksi dalam negeri/PINDAD seperti SS1 V5, untuk dikawal Polisi menggunakan senjata api kaliber 12,7 mm dan kaliber 20 mm.

Wilayah mana yang saat ini menjadi prioritas

pengamanan?

Wilayah yang menjadi prioritas pengamanan adalah perairan Selat Malaka yang menjadi lintas perekonomian dunia dan kita menjadi bagian lintasan dan penyangga perairan Selat Malaka yang menjadi perhatian dunia, meskipun demikian ada beberapa titik kerawanan yang harus kita jaga dan amankan dari pelaku kejahatan illegal fishing, illegal mining, illegal logging, terorisme dan kejahatan lainnya seperti Perairan Natuna, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku dan pintu-pintu masuk pulau terluar yang memungkinkan para pelaku kejahatan untuk masuk dan melakukan tindak kejahatan mengeksploitir kekayaan sumber daya alam laut kita yang sangat merugikan negara. Serta Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Tentang penegakan hukum, sejauhmana pelaksanaannya?

Mengenai sejauh mana pelaksanaan penegakkan hukum yang sudah dilaksanakan Polisi Perairan bahwa berdasarkan penggelaran kekuatan kapal-kapal polisi yang sudah digerakkan untuk memback-up ke seluruh titik – titik rawan di seluruh perairan di Indonesia sepanjang tahun 2009 sudah melakukan penindakan (359 kasus) dan ditahun 2010 (429 kasus) dimana kasus yang termasuk besar dan menjadi atensi

Kapolri adalah illegal fishing 104 kasus, illegal mining 3 kasus, kehutanan 44, migas 53 kasus, psikotropika/narkotika 3 kasus, (data lengkap terlampir). Dalam penegakan hukum Polair menggunakan pola penyidikan di laut, yaitu penyidikan awal oleh kapal patroli dan dilanjutkan oleh penyidik di Ditrektorat Kepolisian Perairan terdekat guna proses lebih lanjut.

Bagaimana bentuk kerjasama dengan luar negeri dalam masalah pengamanan?

Pengamanan lintas negara sejauh ini sudah dilaksanakan secara intens dan berkesinambungan dalam bentuk kerjasama dengan beberapa negara dimana yang sudah terjalin adalah kerjasama dengan Singapura (INDOSIN), Malaysia (MALINDO) dan sebagainya. Sedangkan kerjasama luar negeri yang lainnya adalah dengan Amerika (ICITAP), Jepang (JICA), Australia (AFP), Korean Coast Guard, Philippine Coast Guard.

Berkaitan dengan masalah batas wilayah NKRI dengan Negara tetangga, seringkali kita "lemah" ketika sudah dihadapkan pada bukti-bukti otentik. Bagaimana dengan masalah batas wilayah perairan Indonesia?

Inilah yang sampai saat ini masih menjadi "peer" para pengambil kebijakan. Secara teori, sudah ada aturan yang mengatur mana batas wilayah perairan Indonesia mana yang milik tetangga. Tapi dalam prakteknya, dalam perkembangannya, masih terjadi perselisihan yang muaranya memperebutkan

wilayah. Lalu yang mana batas wilayah perairan Indonesia? Wilayah Indonesia terdiri atas perairan pedalaman, perairan kepulauan (archipelagic waters) dan laut teritorial (Indonesia memiliki kedaulatan), serta Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen.

Penetapan batas wilayah tersebut sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum, yaitu UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, UU No. 17 tahun 1985 tentang konvensi Hukum Laut Internasional, UU No. 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Kemudian ada UNCLOS 1982, PP No. 37 tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan dalam PP No. 38 tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik - titik garis pangkal kepulauan Indonesia, PP No. 37 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik - titik garis pangkal kepulauan Indonesia, dokumen perjanjian batas maritim Indonesia dengan negara tetangga, dokumen batas landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut : "Continental Shelf Submission of Indonesia, Partial Submission in Respect of the Area of North West of Sumatera" ISBN : 978 - 979 - 26 - 6921 - 3.

Lalu apa pegangan aparat polair ketika bertugas di laut agar tidak nyasar?

Secara teknis lapangan semua kapal Polri yang melaksanakan tugas dibekali dengan peralatan navi-





gasi yang modern dan dapat dipercaya kehandalannya, antara lain GPS, Peta, Radar. Sehingga penentuan posisi dilaut dapat dipertanggungjawabkan.

Program Grand Strategy Polri sudah sampai pada tahap partnership building. Program apa yang sekarang sedang direncanakan/disiapkan untuk Polair? Bagaimana dengan pelaksanaan Quick Win?

Kalau bicara soal quick wins maka kita kembali ke program Grand Strategy Polri yang terdiri dari tiga sasaran yakni Trust Building (membangun kepercayaan), Partnerships Building (membangun kemitraan) dan Strive for Excellent. Nah sekarang ini kita, terutama Polair sedang menjalankan program Partnerships Building (membangun kemitraan).

Untuk mempercepat program tersebut, untuk mengakselerasikan, Polair merumuskan program quick wins dengan 3 program yaitu pengamanan garis pantai, sambang nusa, Polmas (perpolisian masyarakat perairan). Dan sesuai dengan kebijakan "revitalisasi" untuk Polair ada dua kegiatan yang dilakukan yaitu pengungkapan dan penanganan kasus menonjol yang dijabarkan menjadi tiga menginventarisasi kasus illegal fishing yang dilimpahkan ke Ditpolair Polda, pengawasan dan pengendalian penyidikan yang dilaksanakan oleh Ditpolair Polda, back-up dan bantuan teknis penyidikan.

Sedangkan untuk pemberantasan kejahatan yang meresahkan masyarakat dan merugikan kekayaan Negara yang dijabarkan sebagai berikut : menyiapkan dan mengendalikan kapal dalam rangka penanggulangan illegal fishing, koordinasi dan tukar informasi dengan instansi terkait, menyiapkan dukungan administrasi duklog, keuangan untuk kapal tugas dalam rangka illegal fishing.

Ke depan tentu Polair harus lebih berkembang. Kemana arah pengembangannya?

Dalam rangka mencapai visi melalui misi guna tujuan organisasi, maka arah pengembangan Direktorat Polair Baharkam Polri berorientasi kepada bagaimana mempersiapkan postur Polair yang mampu mengamankan keamanan di wilayah perairan Indonesia, konsisten dalam penegakan hukum dan mampu memberikan pelayanan dan pengamanan terutama kepada masyarakat-masyarakat di wilayah perbatasan. Arah pengembangan meliputi sumber daya manusia, kemampuan, sarana dan prasarana. Arah penataan dan pengembangan postur Polair ke depan adalah dengan membentuk struktur organisasi yang sudah kita rumuskan dalam buku profil Dit Polair.



FOTO: EWAJAGRATARA

Lalu bagaimana tahapannya?

Tahap pertama kita lakukan tahun 2010-2011 yaitu melakukan pengembangan organisasi di tingkat Mabes Polri dan tingkat Polda dan mempersiapkan pengembangan postur Polair dan jajaran dengan mengacu kepada hakekat ancaman di masa depan dengan terwadahnya fungsi lidik/sidik pada struktur kapal dan pengembangan kemampuan operasional serta peningkatan pelayanan masyarakat perairan, optimalisasi Satpolarwil I sampai dengan VI yang masing-masing dipimpin oleh Kombes, selanjutnya pembentukan Detasemen Anti Teror dsb. Selanjutnya Tahun 2012-2014, adalah pemantapan kinerja organisasi dengan operasionalisasi Polair Mabes, Satpolair Wil yang didukung satuan kewilayah secara terintegrasi dengan teknologi informasi.

Berkaitan dengan pembinaan internal, langkah apa saja yang sudah dilakukan – misalnya dalam penerapan reward and punishment? Apa yang dilakukan untuk memotivasi anggota?

Berkaitan dengan pembinaan internal, kita sudah melakukan komitmen dengan langkah-langkah yang konstruktif, intens dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Kepolisian Perairan yang professional, proporsional, humanis dan modern dalam menghadapi masyarakat yang semakin kritis dan demokratis di zaman yang semakin modernis, langkah-langkah tersebut juga dilakukan dengan memberikan reward and punishment kepada jajaran Polair sebagai berikut: Untuk Reward kita telah melakukan upaya-upaya untuk memotivasi anggota agar melaksanakan tugas dengan optimal dengan memberikan penghargaan bagi Komandan Kapal yang dinyatakan berhasil dalam melaksanakan tugas, memberikan insentif bagi Komandan kapal dan anggota yang berhasil menangkap pelaku tindak pidana di perairan, memberikan prioritas untuk mengembangkan karier termasuk Selapa, PTIK dan Sespimb. Lalu apa punishmentnya? Kita telah menurunkan jabatan para Komandan Kapal yang tidak mendapat tangkapan/penindakan atau tidak melaksanakan tugas secara optimal dan melakukan pelanggaran yang bisa menurunkan martabat/citra kesatuan, dan melakukan pemeriksaan bagi anggota yang melakukan pelanggaran disiplin/indisipliner dan anggota yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mengenai kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anggota di lapangan. Bagaimana Bapak melihat persoalan ini?

Mengenai pelanggaran yang dilakukan anggota tentunya kita akan melakukan pembinaansesuai mekanisme yang berlaku di kedinasan sebagaimana PP 1/2/3 tahun 2003, Kepolisian Perairan mempunyai Provost yang akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran hukum dan

kita akan menindak secara tegas apabila melakukan tindak pidana. Sebagai upaya pencegahan antara lain dilakukan Jam Komandan; Penerapan Reward and Punishment, dilaksanakan secara rutin santiaji dan pengawasan dan pengendalian yang ketat.

Menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh Mabes untuk menciptakan polisi-polisi perairan yang tangguh, cekatan dan professional dalam menjalankan tugasnya?

Menurut saya untuk menciptakan Polisi Perairan yang tangguh, cekatan dan professional antara lain memenuhi alat dan sarana pendukungnya, menyiapkan SDM yang professional dan mempunyai kualifikasi kompetensi dibidang pelaut dan mempunyai kemampuan Kepolisian yang dapat diandalkan, organisasi yang solid dan kuat dari pusat sampai kewilayahan dan anggaran yang memadai.

Sebagian karir Bapak terlama di Polair. Apa sesungguhnya Polair ini dalam pandangan Bapak?

Saya melihat Pol air ini belum menjadi fokus perhatian seperti halnya polisi di darat. Untuk itu ke depannya harus ada perubahan. Pertama, saya ingin nantinya fungsi pol air ini bisa dipelajari, dimasukkan dalam kurikulum pendidikan polisi dari tingkat bintara sampai tingkat Akpol Pendidikan pol air harus jadi materi dan pengetahuan dasar dan menjadi cikal bakal dalam pendidikan polisi. Mengapa? Karena pol air juga melaksanakan fungsi lantasi, fungsi serse, fungsi samapta dsb. Kedua, saya ingin di polsek-polsek ada unit pol air. Ketiga, saya ingin nantinya terbentuk semacam UU yang jelas mengatur keamanan di perairan. Keempat, masyarakat harus kenal Polair, harus ada pengetahuan bagi mereka bahwa Mapolda adanya di kota. Polair adanya di pantai.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT

I. NAMA : Drs. BUDI HARTONO UNTUNG

PANGKAT/NRP : BRIG JEN POL / 59060932
JABATAN : DIRPOLAIR BAHARKAM POLRI
TGL LAHIR : CIMAHI, 15-06-1959
SUKU BANGSA : INDONESIA / JAWA
AGAMA : ISLAM

II. TANDA JASA YANG DIMILIKI

1. SL. KESETIAAN 8 TH
2. SL. KESETIAAN 16 TH
3. SL. KESETIAAN 24 TH
4. SL. BINTANG BHAYANGKARA NARARYA
5. SL. KARYA BHAKTI
6. SL. DWIDYA SISTHA
7. SL. KSATRIA TAMDAMA



MEREKA, PARA KOMANDAN

Mereka terpilih dan dipilih tentu melalui serangkaian penilaian yang mengarah kepada kemampuan memimpin, kemampuan bekerja dalam team work, mampu menjalankan tugas yang diemban dan kemampuan mengayomi anggotanya. Namun yang paling utama adalah kemampuan menjalankan tugas, visi dan misi Polair dan kemampuan menjabarkan kebijakan dan strategi pimpinan Polri saat ini. Inilah para komandan Ditpolair Baharkam Polri.

Kombes Drs. SATRIA F. MASEO, SH, MH WADIR POLAIR

SEBELUM masuk jajaran Polair Baharkam, Satria Maseo adalah Direktur Kerjasama Lembaga Pada Pusat pelaporan Dan Analisis Keuangan Mabes Polri (2004). Kalau dia sering melakukan perjalanan ke luar negeri ke sejumlah negara itu hal biasa karena memang sudah merupakan tuntutan pekerjaannya. Sebaliknya, dia pun sering masuk keluar hutan ketika dialih tugaskan sebagai Kanit IV Dit V/Tipiter Bareskrim Polri.

Dan setahun lalu, tepatnya 17 Oktober 2009 pria yang memiliki pribadi bersahaja ini mem-back-up rekan satu liftingnya Brigjen Pol Budi Untung sebagai orang kedua di jajaran Polair Baharkam. Sebagai orang kedua, tugasnya selain mengambil alih tugas pimpinan bila berhalangan, juga melaksanakan pekerjaan yang sifatnya ke dalam, salah satunya pembinaan personel. Ngomong-ngomong seputar tugas pokok, visi dan misi Dit

Polair, pria yang penugasannya lebih banyak di wilayah Indonesia Bagian Tengah ini malah mengutip komentar "orang luar" yang ketetulan saat ini menjadi konsultan untuk penerapan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Dit Polair Baharkam Polri. "Orang itu bilang ternyata tugas dan tanggung jawab Polair itu sangat berat dan kompleks....," tukas pria kelahiran Surabaya, 30 Januari 1960 ini. 0 jt 02



FOTO: EVAJAGRATARA

Kombes Drs. ASEP KADIR INDRA KELANA

SUB BAGIAN OPERASI (SUBBAGOPS)

SIAPA orang paling lama menduduki jabatan direktur di polda yang sama barangkali Kombes Asep Kadir Indra lah orangnya. Tak tanggung-tanggung, 11 tahun lamanya ayah tiga anak ini menjabat Dir Polair Polda Riau, yaitu pada kurun waktu 1991-1990 dan 2007-2009.

Bagaimana ceritanya? "Yaah ibaratnya kena "her" pasti bertujuan baik, biar nilai saya jadi bagus he...he.." tukas ayah dari tiga anak ini. Jadi jangan ditanya lagi penguasaannya soal ilmu perairan, pasti sudah "ngelotok". Jadi paslah kalau sekarang dia menjadi "otak" dari semua kegiatan operasional seluruh fungsi yang ada di Dit Polair Baharkam. Mulai dari merancang, menggelar bahkan menjadi juri penilai berkaitan dengan pelaksanaan tugas anggota di lapangan.

Khusus untuk tugas yang terakhir ini, Asep Indra Kelana tak mau kompromi kalau ada anggota yang hasil pekerjaannya tidak memenuhi target. "Kalau nilainya bagus, hadiahnya bisa promosi jabatan atau penghargaan. Tapi kalau merah bisa sanksi administratif atau bahkan di-grounded.."

Kembali ke cerita awal, katanya, kelamaan di Riau, kelamaan di "air, selain kemampuan bidangnya bertambah, juga memperoleh dua hal bermakna. Yang pertama, kalau ada pepatah dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung, maka dia menemukan sebuah motto sebagai hasil bergaulnya dengan masyarakat Riau.

"Kebiasaan itu tak selalu benar, tapi kebenaran harus selalu dibiasakan". Sedangkan yang kedua - ini kaitannya dengan lamanya tugas di "air" - dia memiliki prinsip hidup seperti ikan.



FOTO: EWAJAGRATARA

Ikan itu lahir di laut, besar di laut, mati pun di laut tapi ikan itu tak pernah asin. "Begitu pun dengan kita, manusia. Kalau beriman, berpendirian teguh, memiliki prinsip, maka hidup di lingkungan manapun tak perlu terpengaruh," ucapnya mantap. Itulah cerita Asep Kadir Indra Kelana,

lulusan Akpol 84, kelahiran 3 Juli 1960, yang mulai bergabung di Ditpolair Baharkam Polri sejak setahun lalu, tepatnya Desember 2009. Dan soal lamanya waktu tugas, selain di Riau 11 tahun, pernah bertugas di Irian selama lima tahun selepas dari pendidikan Akpol. 0 jt 02

Kombes Drs. ADE SUBARDAN

KASUBDIT BIN GAKKUM

LIMA tahun silam, tepatnya 3 Juni 2005, Ade Subardian mulai menduduki jabatan ini, dimasa kepemimpinan Brigjen Drs. I Nengah Sutisna, MBA dan Brigjen Pol.

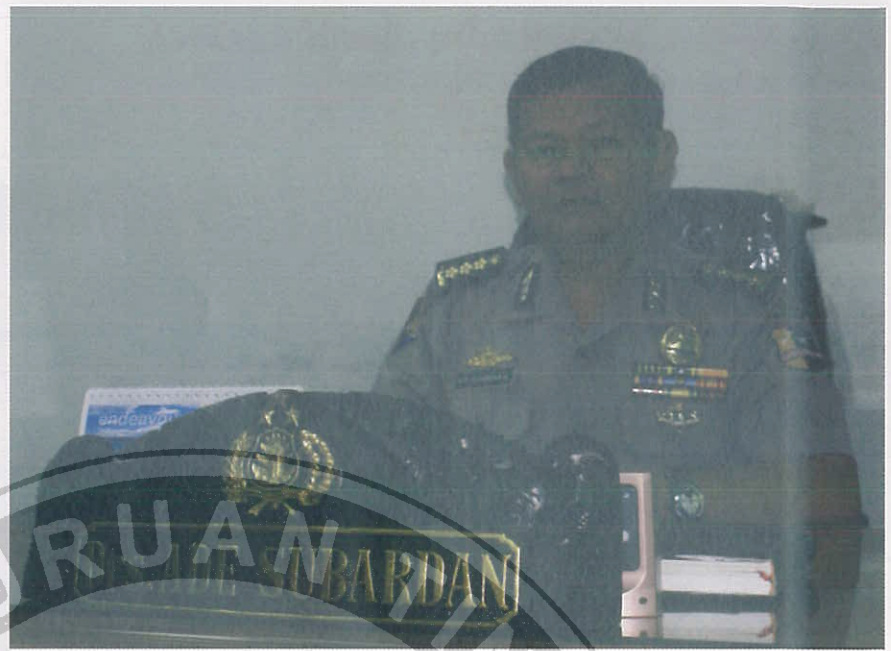
Drs. Abdurachman. Tentu sudah cukup banyak pengalaman yang berhasil digalinya selama kurun waktu itu, termasuk merasakan berbagai perubahan kebijakan yang

terjadi di tubuh Polri. Zaman berubah, kepemimpinan berubah maka kebijakan pun biasanya berubah. Itu yang lazim terjadi. Tapi ada satu yang tidak

berubah. Apa? Penilaian orang terhadap kinerja Polair. "Sampai sekarang masih saja orang mengatakan Polair hanya membuang-buang BBM tapi hasilnya tidak ada!" tukas pria kelahiran Garut 9 Maret 1953 ini.

Meski terasa tak nyaman di kuping, toh dia mencoba memakluminnya karena faktanya memang seperti itu. Bahwa memang hanya dengan modal 10 liter BBM reserse di darat bisa melakukan patroli keliling kecamatan dan pasti menemukan pelanggaran, lalulintas misalnya. Sementara patroli di laut sekalipun sudah menghabiskan 10 ton BBM tak memperoleh hasil. Tapi orang lupa bahwa di laut tidak dikenal adanya TKP. Tidak ada kasus yang didapat berdasarkan laporan masyarakat seperti di darat, siapapun bisa datang ke kantor polisi, melapor, polisi datang ke TKP, diperiksa ada barang bukti jadilah perkara.

Sementara di laut tak pernah ada laporan ke polisi, tapi semua kasus karena tertangkap tangan. Mau pelanggaran pelayaran, pencurian, pembunuhan, semua karena tertangkap tangan. "Kalaupun ada paling kasus perselisihan akibat kapal tabrakan. Kejadiannya sudah lewat baru laporan ke polisi," jelas



lulusan Akpol 1977 ini.

Pria yang menguasai empat bahasa daerah yaitu Jawa, Sunda, Aceh dan Padang ini pun kemudian menambahkan bahwa faktor jarak sangat mempengaruhi tingkat penyelesaian kasus di perairan. "Seyogyanya setiap ada kasus kita serahkan ke polres tapi karena kejauhan terpaksa ke polsek terdekat yang tak memiliki pengetahuan perairan. Akhirnya penanganannya pun jadi lama," ungkapnya. Sebelum masuk Polairud Ba-

harkam, Ade adalah Dir Polair Polda Sulut. Sebelumnya Kasat Polairuid Dit Samapta Polda Jateng, Kapolres Bantul Polwil Yogyakarta Polda Yogyakarta, Irdabin Itpolda Irja, Ka SPN Jayapura Dit Diklat Polda Irja, Waka Pusdik Polairud Lemdiklat Polri, Kasat Polairud Polda Maluku, Direktur Polair Polda Sulut, Kasubdit bin Gakkum Ddit Polair Babinkam Polri. JT 02

Kombes Pol Drs. DWI MARSANO

KASUBDIT FASHARKAN

MELAKSANAKAN tugas yang diamanatkan pimpinan, bagi Dwi Marsanto, merupakan kewajiban yang harus dilakukan dengan keikhlasan. Dengan sikap seperti itu dirinya pun meyakini bakal memperoleh hasil yang baik. Dia juga pantang menjadikan "keterbatasan" sebagai alasan. Itulah prinsip yang dipegang pria yang memulai karirnya di Polair pada tahun 1982 hingga 1992.

Setelah itu dipindah ke Polair Papua selama 4,5 tahun, kemudian Kasatpolair Banjarmasin dan Palembang. Kembali lagi ke Papua dan seterusnya masuk Polair Baharkam sebagai Kasatrol hingga 2008 akhir dan sekarang Kasubdit Fasharkan.

Karena tuntutan tugasnya sebagai penyedia fasilitas dan sarana bagi kelancaran tugas Polair, maka dia selalu mengusahakan agar semua kapal selalu siap operasional

kapanpun diperlukan. Tak penting sekalipun jumlah anggaran untuk melakukan pekerjaan itu sangat terbatas, yang terpenting adalah niat.

Ngomong-ngomong berapa besar anggaran yang diperlukan? "Kalau kita bicara yang normatif pantasnya Polair memiliki 56 kapal dan dana 200 milyar setiap tahunnya. Namun pemerintah hanya bisa mendukung 15 milyar," ungkap Dwi Marsanto yang baru saja



sedikit “istirahat” setelah enam bulan terakhir disibukkan dengan kegiatan mempersiapkan pelayanan Subditfasharkan memenuhi standar internasional.

Sejumlah persyaratan sudah terpenuhi dan sejumlah tahapan pun terlalui tanpa hambatan. Dan atas usahanya itu bisa dipastikan pada hari ini, Dit Polair Baharkam Polri berhak menerima Sertifikat SMM ISO 9001 : 2008, setelah proses penerapan ISO di Sub Direktorat Asilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan) yang menjadi tanggungjawabnya dianggap telah sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan oleh ISO. “Syukur alhamdulillah,” ucap kelahiran Surakarta 18 Februari 1957 ini bersyukur. 0 jt 02

AKBP Triyono Wibowo

Kasatrolnus

SATUAN Patroli Nusantara disingkat Satrolnus adalah unsur pelaksana utama yang berada dibawah Ditpolair. Satrolnus bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat serta patroli dan pengawalan kapal Polisi dalam rangka perlindungan, pelayanan, pengayoman, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibawah kepemimpinan Triyono Wibowo, tahun ini salah satu kapal patrolinya yaitu Antasena 509 berhasil menjalankan misi kemanusiaan di Kepulauan Mentawai, lokasi terjadinya musibah tsunami Oktober silam. Inilah kapal pertama milik Direktorat Polair dan satu-satunya yang berhasil mengangkut bantuan pangan dan pakaian bagi para korban. Atas keberhasilan ini, kapolri Jen-

deral Timur Pradopo memberikan apresiasi berupa pujian. Dan ketika hal ini dikonfirmasi kepada TrIyono Wibowo, pria yang sosoknya terlihat serius ini menolak untuk bicara banyak. “Jangan saya yang diwawancara tapi komandan kapalnya, Herry, dia yang lebih tahu karena memang ada di lokasi,” elaknya seraya memberikan nomor kontak komandan yang dimaksud. 0 JT 02



Kompol Hery Nooryanto, Sik

Perjalanan Bersama Allah



GEMPA bumi yang disusul tsunami yang menerpa Kepulauan Mentawai pada 25 Oktober 2010, selalu lekat dalam ingatan ayah satu anak ini. Tangis dan air-mata keputusan mereka yang jadi korban bencana tersebut seakan terus menari-nari di matanya. "Sumpah ini sebuah pengalaman tak terlupakan dalam sejarah karir saya bertugas," ucap Kompol Hery Nooryanto, yang baru sepekan kembali dari Mentawai usai membawa rombongan Polda Sumbar dalam sebuah misi kemanusiaan ke Mentawai, awal Oktober lalu.

Hery Nooryanto adalah komandan kapal Antasena 509, Kapal Patroli Dit Polair Baharkam, satu-satunya kapal yang beruntung bisa masuk ke kepulauan yang dilanda musibah tsunami itu. Pujian dan ucapan selamat dari rekan-rekan sejawat dan atasannya pun tertuju padanya, bahkan kapolri memberi apresiasi atas keberhasilan itu. "Ya begitu lah," ucap Hery yang berkesempatan mampir ke redaksi Jagratara, Kamis (25/11) lalu sambil memperlihatkan foto-foto dari lokasi bencana.

Ayah satu anak ini pun bercerita pengalamannya bahwa tanpa campur tangan Allah misi itu mustahil terlaksana. Sebab sejak berangkat memulai perjalanan, hambatan alam menghadang di depan. Cuaca yang berubah-ubah, angin disertai badai, ombak dan kabut tebal serta pusaran angin yang berputar-putar merupakan

faktor alam yang sulit dilalui menurut hitungan logika. Tapi kalau Allah sudah bekerja, tak ada yang tidak mungkin. Apalagi kalau umatnya meminta sungguh-sungguh dengan niat yang baik.

Bahwa Allah menyertai perjalanan mereka, tidak hanya dia rasakan tapi juga seluruh rombongan penumpang Antasena. Hal itu terbukti setiap kali seisi kapal melakukan doa bersama menjelang lego jangkar ajaib ombak menjadi tenang, langit cerah dan tak ada lagi angin dan badai. Kejadian itu bukan hanya sekali, tetapi berulang kali.

"Ini sebuah petanda bahwa Allah SWT menyertai dan selalu ada dalam setiap perjalanan kami untuk menjalankan misi kemanusiaan itu," kata pemilik motto "Segala sesuatu yang menjadi tugas dan kewajiban harus dilaksanakan secara ikhlas selebihnya biarlah Allah yang menentukan".

Soal cuaca yang berubah-ubah, konon menurut pemahaman masyarakat setempat, penyebabnya karena di dalam dasar laut masih ada korban tsunami yang belum berhasil ditemukan. Entah itu benar atau tidak namun secara ilmiah, kata Hery,

gejolak itu akibat badai tropis yang sedang bertiup di Samudera India hingga berdampak pada kondisi laut yang menyebabkan terjadinya ketinggian gelombang.

Misi kemanusiaan itu sendiri, yang dipimpin Dir Polair Polda Sumbar berhasil menemukan 130 mayat dan tim DVI sempat memberikan pengobatan 60 pengungsi di empat titik lokasi bencana yaitu Pororogat, Sabiren, Surak Aban, Mapinang, Malakopa, Belaraksok, Muntei, Muntei Baru-baru, Sabeogukguk, Betumonga, baru-baru, Besowa, dan Siuban.

Hery adalah lulusan Akpol 1997 dari Yon Wira Pratama, menyelesaikan pendidikan PTIK tahun 2006 angkatan 45. Mulai bertugas sebagai Pamapta C Polresta Padang-Polda Sumbar (1998), Panops Kapal Type B Subdit Polair, Dit Samapta Mabes Polri (1999), Kanit Provost Subdit Polair (2000-2002), Komandan Kapal Kp. Starnaja-003 (2003), Komandan Kapal Kp. Nuri-612 (2003), Komandan Kapal Kp. Alap-alap-622 (2003-2005), Komandan Kapal Kp. Cucak rawa-637 (2006-2007) dan sekarang Komandan Kapal Kp. Antasena-509.

[jt 02]



ABK KITA BERPENGALAMAN

KALAU ada yang mengatakan kemampuan personel polisi perairan kita kurang "mumpuni" untuk menjalankan tugas pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan, maka Made adalah orang pertama yang tidak sependapat. Para ABK kita, katanya, justru rata-rata punya cukup berpengalaman dan memiliki strategi yang baik dan siap menjalankan tugas di wilayah perairan manapun. Kalaupun pernah ada kejadian, penyebabnya bukan soal kemampuan personel melainkan jumlah.

"Nah kalau soal banyak-banyakan, kita nyerah deh." jelas Made seraya menambahkan kekurangan personel bukan lagi cerita baru tapi sudah menjadi

kendala sejak lama dan itupun tidak menjadikan alasan.

Kalau bicara soal kendala di lapangan (perairan), khususnya sepanjang pengalamannya melakukan penegakan hukum di wilayah perairan, kendala geografis justru yang terberat. Jarak tempuh yang jauh, cuaca yang tidak menentu membutuhkan perjuangan yang berat. "Di saat itulah kita membutuhkan keahlian khusus ABK kita," ungkapnya.

Kemudian soal penegakan hukum di perairan, jelasnya, pada prinsipnya sama saja seperti halnya di darat karena penanganan perkaranya sama-sama berpatokan pada KUHAP. Sedangkan yang membedakan adalah kalau di laut tidak mengenal TKP tapi adanya GSPP (Gambar Situasi Pengejaran dan



Pembuktian). GSPP inilah yang wajib dibuat oleh komandan kapal. "Di situ digambarkan bagaimana pengajaran sebuah kapal dilakukan berpatokan pada GPS (Global Positioning System) dan peta. Itulah pengganti dari TKP," papar Made. [JT 02]

SUDAH MEMBUKA DIRI

PERAN humas saat ini harus mengubah paradigma kehumasannya. Bukan lagi sebagai lembaga anti kritik tetapi harus menganut prinsip keterbukaan, transparan dan mampu membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. "Inilah fungsi yang coba saya jalankan di Direktorat Polair ini," jelas Kompol Nyoto

Nyoto – dibantu stafnya, mengambil peran itu sedikit demi sedikit. Tapi diyakininya bisa berdampak positif bagi eksistensi Direktorat Polisi Perairan Baharkam Polri. Kalaupun belum menyebar di kalangan masyarakat luas, minimal di kalangan sendiri.

Yang dibicarakan sekarang ini adalah sebuah pekerjaan mengkliping atau mendokumentasikan seluruh kegiatan operasional seluruh fungsi Dit Polair dan juga kegiatan yang sifatnya kegiatan intern. "Inilah upaya kami untuk mulai "membuka" diri," jelas Nyoto, yang lulusan Akademi Pelayaran ini.

Upaya lainnya, Nyoto juga mulai rajin meng-upload kegiatan tersebut di website Dit Polair. Mau lihat? "Coba klik di www.polair.or.id!" terang Sanyoto. [jt02]

